



RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN. AFFAN BAKHSIN NO. 01 Tlp.(0739) 21233 MANNA 38518

MANNA, 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Semenjak bergulirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan Pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good government* dan *clean governance* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan dilakukannya optimalisasi di segala bidang yang dimulai dengan perencanaan pembangunan yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah

sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan pembangunan pendidikan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan pendidikan yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan pendidikan di daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara efisien, efektif, profesional dan berkesinambungan serta telaksana secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016–2021.

Rencana Strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama

kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

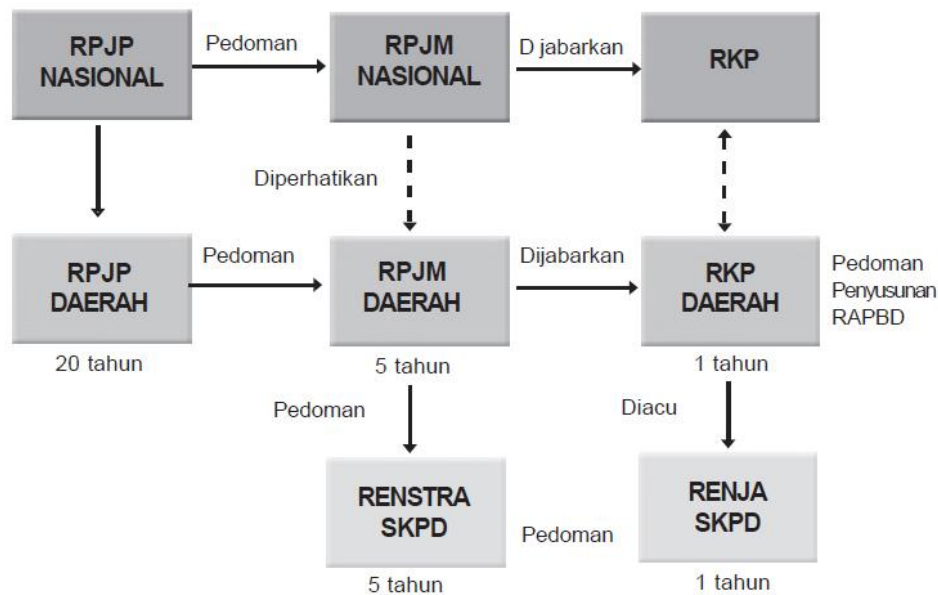
Fungsi rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam urusan pendidikan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan, mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Proses penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu : tahap pertama : persiapan penyusunan renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja tim renstra serta pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra. Tahap ketiga : penetapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional

maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut :

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Pembangunan pendidikan menempatkan peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu mengaktualisasikan potensi menjadi sebuah kompetensi dalam rangka menciptakan insan yang berbudi dan mandiri. Pendidikan dilaksanakan sepanjang hayat diberikan kesempatan untuk belajar. Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga pelaku usaha serta masyarakat yang paling utama.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang

status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, disusunlah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial , termasuk diantaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan , meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya guna mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, untuk meningkatkan daya saing regional. Dalam hal ini pendidikan dituntut untuk mampu melengkapi lulusannya agar memiliki ketrampilan teknis (*hard skill*) dan juga kemampuan untuk berpikir analitis, berkomunikasi , serta bekerjasama dalam tim yang secara keseluruhan sebagai keterampilan teknis (*soft skill*).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016–2021 ini digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan . Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya

dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur dan berakhlak mulia.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang teguh norma dan nilai : Norma agama dan kemanusiaan, norma persatuan bangsa, norma kerakyatan dan demokrasi dan nilai-nilai keadilan sosial.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan didasarkan pada beberapa paradigma yang meliputi :

- a. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya
- b. Pembelajaran Sepanjang Hayat
- c. Pendidikan untuk semua.
- d. Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan

1. 2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun propinsi, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun

- 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu;
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2005-2025
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 – 2031;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 ini disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan

yang ingin dicapai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi, Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021.

Secara spesifik maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah antara lain :

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 ini untuk merumuskan dan menetapkan visi, misi , tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta upaya mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang efisien, efektif dan professional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 – 2021.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan.
4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016-2021.
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rensta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 (Lampiran Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, adapun

sistem penulisan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

Sistimatika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

3.4 Tealaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi, Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan .

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS DIKBUD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan lebih lanjut sebagaimana termaktub dalam salah satu program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu melakukan revitalisasi fungsi lembaga perencanaan daerah termasuk di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga pengelola keuangan daerah.

Pelayanan di bidang Pendidikan ditunjukkan melalui penyediaan sarana dan prasarana secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 09 Tahun 2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pemberian Perizinan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan Kebudayaan.

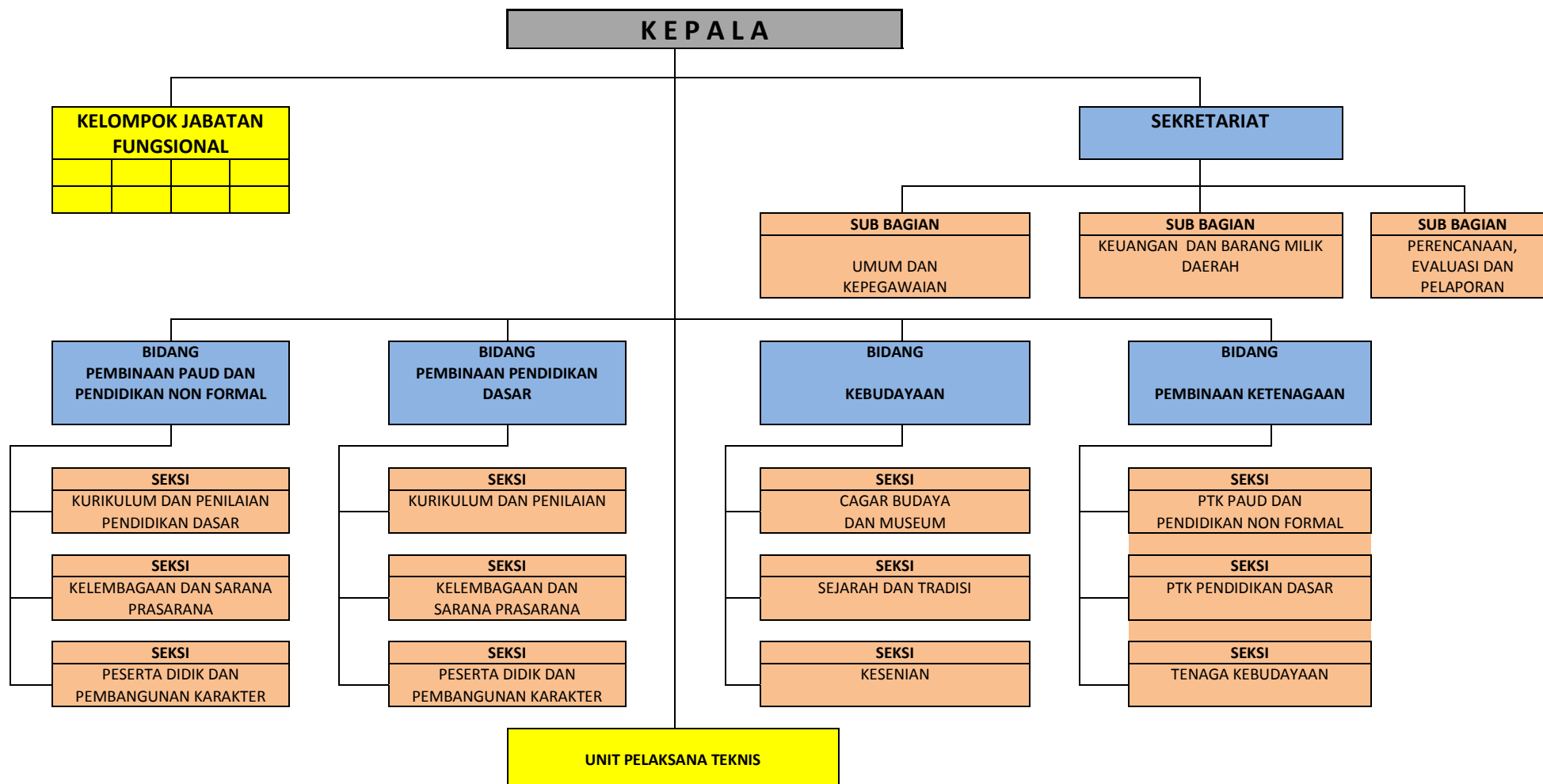
3. Pembinaan teknis di bidang Kebudayaan.
4. Pembinaan Unit pelaksana Teknis Dinas.
5. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Pelaksanaan Ketatausahaan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 3 sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Formal
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar yang terdiri dari 3 Seksi yaitu :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
5. Bidang Kebudayaan terdiri dari 3 seksi yaitu :
 - a. Seksi Cagar Budaya dan Museum
 - b. Seksi Sejarah dan Tradisi
 - c. Seksi Kesenian

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari 3 Seksi yaitu :
 - a. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - b. Seksi PTK Pendidikan Dasar
 - c. Seksi Tenaga Kebudayaan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

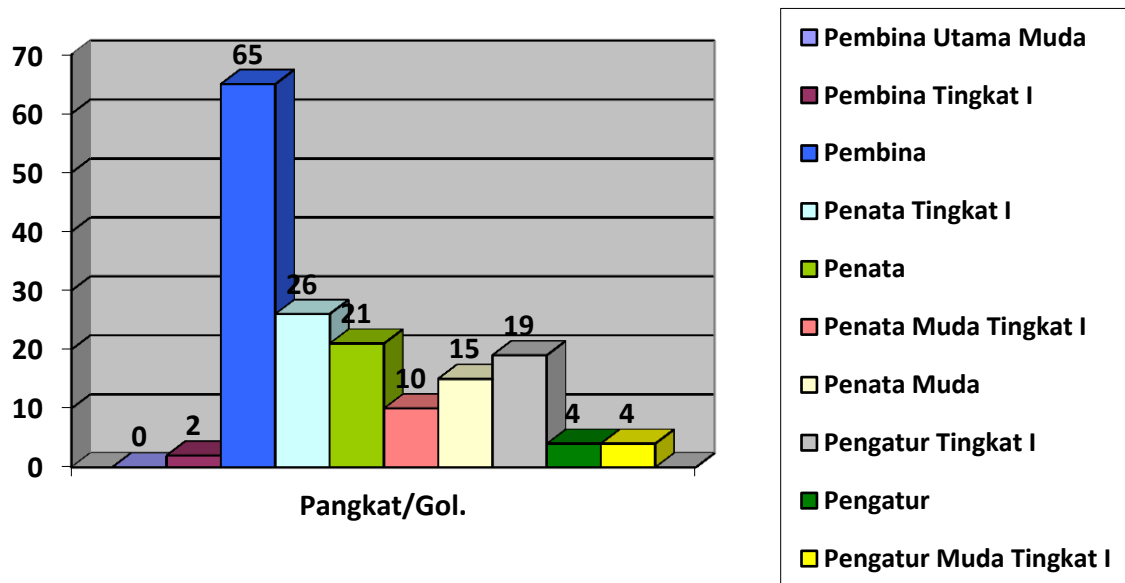
Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/C	1
2	Pembina Tingkat I	IV/B	26
3	Pembina	IV/A	33
4	Penata Tingkat I	III/D	24
5	Penata	III/C	14
6	Penata Muda Tingkat I	III/B	28
7	Penata Muda	III/A	10
8	Pengatur Tingkat I	II/D	3
9	Pengatur	II/C	4
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	3
11	Pengatur Muda	II/A	2
12	Juru	I/C	1
JUMLAH			149



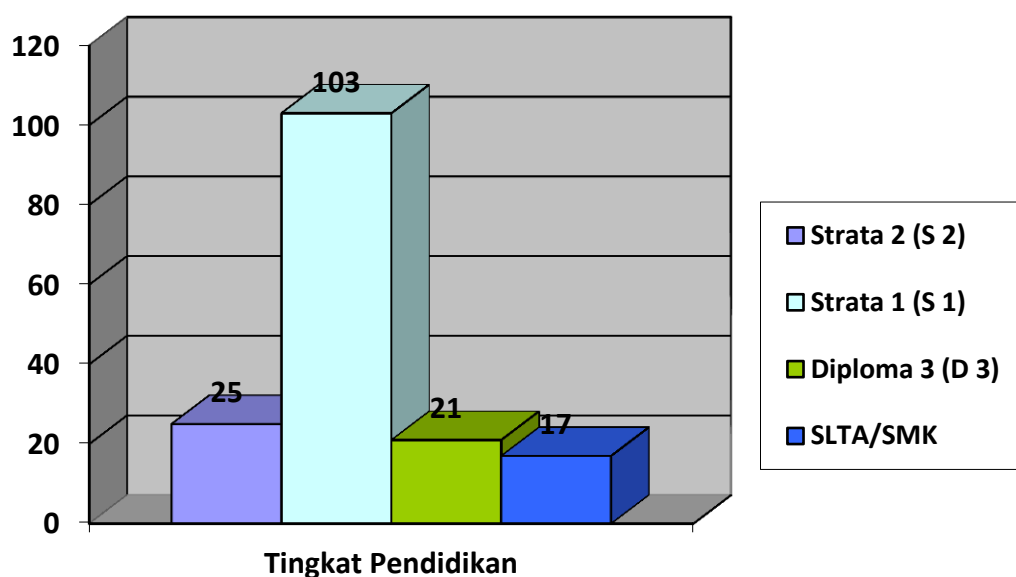
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2	30 Orang
2.	Strata 1	97 Orang
3.	Diploma 3	6 Orang
4.	SLTA / SMK	13 Orang
5.	SLTP	3 Orang
JUMLAH		149 Orang



3. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	IV	-
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	IV	3
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	III	8

4. Sumber Daya Aset/Modal

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH DAN SATUAN		NILAI (Rp.)
1.	Alat - alat Angkutan	72	Buah	765,000,000
	- Sepeda Motor	72	Buah	720,000,000
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	270	Buah	294,800,000
	- Mesin Ketik Manual	5	Buah	9,000,000
	- Filling Kabinet	8	Buah	4,000,000
	- Brangkas	1	Buah	2,500,000
	- Lemari Kayu	24	Buah	12,000,000
	- Papan Pengumuman	5	Buah	3,500,000
	- White Board	2	Buah	400,000
	- Meja Biro	6	Buah	5,000,000
	- Meja 1/2 Biro	22	Buah	11,000,000
	- Kursi tamu	5	Buah	4,000,000
	- Kursi Putar	18	Buah	13,500,000
	- Meja Komputer	14	Buah	5,600,000
	- Kursi Plastik	50	Buah	4,500,000
	- Jam Dinding	5	Buah	500,000
	- Air Conditioner (AC)	10	Buah	32,000,000

	- Kipas Angin	9 Buah	1,800,000
	- Televisi	6 Buah	11,000,000
	- Sound System	2 Set	4,000,000
	- infocus	3 set	20,000,000
	- Wireles	1 Buah	4,000,000
	- Unit Power Supley	8 Buah	8,000,000
	- Stabilisator	6 Buah	3,000,000
	Gambar Presiden/Wakil - Presiden	6 Pasang	3,000,000
	- Dispenser	4 Buah	1,000,000
	- Computer PC	8 Unit	22,000,000
	- Laptop	31 Buah	170,500,000
	- Printer	12 Buah	12,500,000
	- CPU	8 Buah	17,000,000
	- Monitor	8 Buah	8,000,000
	- Meja Rapat Ruangan Kadis	1 Set	6,000,000
	- Meja Tamu	6 Set	12,000,000
2.	Alat Studio dan Alat Komunikasi		11,400,000
	- Handy Cam	2 Buah	7,000,000
	- Camera Film	4 Buah	4,000,000
	- Pesawat Telepon	1 Buah	400,000
TOTAL			1,071,200,000

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan tahun 2015 ditunjukkan melalui Jumlah Sarana dan Prasarana pendidikan yang telah di bangun /direhabilitasidari tingkat pendidikan dasar sampai ke tingkat pendidikan menengah serta ditandainya pencapaian jumlah lulusan sekolah baik tingkat SD, SMP/MTs dan SMA/SMK dengan nilai kelulusan yang cukup signifikan pada tiap tahunnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai orang tua murid. Pelayanan pendidikan pada tiap jenjangnya selalu menggambarkan adanya peningkatan baik kualitas maupun kuantitas selama dua tahun terakhir. Beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelulusan siswa dari berbagai tingkatan.
3. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana guna memenuhi standar pelayanan minimal yang diharapkan.
4. Meningkatnya efisien dan efektifitas proses belajar mengajar pendidik dan tenaga kependidikan.

Namun peningkatan kualitas pendidikan tersebut, belum diikuti oleh peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas.
2. Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan valid.
3. Belum terlaksananya pemerataan guru pendidik pada daerah pelosok pedesaan.
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi pendidikan.
5. Belum dilaksanakan sepenuhnya prosedur standar operasional Standar Pelayanan Minimal pendidikan.
6. Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
A	Standar Pelayanan Minimal (SPM)															
I	Sekolah Dasar															
1	% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa	-	-	-	83,46	83,43	-	-	-	53,44	58,32	-	-	-	64,03	69,90
2	% SD yang telah memenuhi ruang kelas dan meja, kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	-	-	-	91,90	91,86	-	-	-	48,01	33,47	-	-	-	52,24	36,44
3	% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap	-	-	-	94,85	94,98	-	-	-	80,70	85,19	-	-	-	85,08	89,69
4	% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	-	-	-	77,91	78,23	-	-	-	76,60	79,22	-	-	-	98,32	101,27
5	% SD yang memiliki 6 orang guru	-	-	-	94,74	94,98	-	-	-	97,40	97,82	-	-	-	102,8	102,9

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
6	% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/DIV	-	-	-	96,53	96,71	-	-	-	95,26	97,53	-	-	-	98,68	100,8
7	% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	-	-	-	75,13	71,30	-	-	-	80,82	82,49	-	-	-	107,5	115,6
8	% Kepala SD yang berkualifikasi S1/DIV bersertifikat pendidik	-	-	-	74,15	74,48	-	-	-	71,69	91,10	-	-	-	96,68	122,3
II	SMP															
1	% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa	-	-	-	76,06	76,15	-	-	-	61,34	62,56	-	-	-	80,65	82,15
2	% SMP yang telah memenuhi ruang kelas dan meja, kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	-	-	-	61,88	62,72	-	-	-	67,51	66,34	-	-	-	109,1	105,7
3	% SMP yang memiliki Ruang Guru Lengkap	-	-	-	80,14	81,27	-	-	-	83,67	85,06	-	-	-	104,4	104,6

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
4	% SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi	-	-	-	85,99	86,57	-	-	-	81,49	81,28	-	-	-	94,77	93,89
5	% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran	-	-	-	92,38	93,64	-	-	-	88,57	71,10	-	-	-	95,88	75,93
6	% SMP yang memiliki guru berkualitas S1/DIV $\geq 70\%$	-	-	-	92,55	93,64	-	-	-	65,15	68,64	-	-	-	72,56	73,30
7	% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/DIV dan memiliki sertifikat $\geq 35\%$	-	-	-	75,35	75,97	-	-	-	25,05	23,32	-	-	-	33,24	30,70
8	% Kepala SMP yang Berkualifikasi S1/DIV dan Bersertifikat pendidik	-	-	-	67,20	68,02	-	-	-	46,82	50,41	-	-	-	69,67	74,11

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
B1	Target IKK															
I	Fokus Kesejahteraan															
1	Angka Melek Huru (AMH)	97,75	97,80	97,81	97,84	97,90	94,29	95,00	95,09	95,27	95,35	96,46	97,14	97,22	97,37	97,40
2	Rata-rata lama sekolah (RRLS)	7,26	7,63	7,64	7,76	7,85	7,54	7,98	7,99	8,00	8,04	103,8	104,5	204,6	103,0	102,4
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	104,5	105,7	105,9	106,2	106,5	103,2	103,7	104,4	105,3	104,2	100,0	100,0	100,3	97,18	98,87
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	93,29	99,55	99,60	99,65	99,70	93,29	99,55	95,03	95,95	95,43	100,0	100,0	95,41	96,29	95,71
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	42,47	45,25	47,59	47,59	53,68	41,47	45,25	48,58	49,98	54,15	100,0	100,0	102,0	98,56	100,8
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	100,0	101,2	101,7	102,3	103,5	100,1	101,2	98,97	99,95	99,98	100,0	100,0	98,7	98,9	98,9
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	79,29	82,83	83,25	82,32	83,92	79,29	82,83	88,77	84,74	85,53	100,0	100,0	100,6	100,9	101,0
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA	34,22	36,08	36,50	37,25	37,75	34,22	36,08	39,76	40,24	48,92	100,0	100,0	108,9	108,8	129,5
B2	Target Pelayanan Umum															
II	Pendidikan Dasar															
1	Angka Partisipasi Sekolah Terhadap Penduduk usia 7-12 tahun	1.103	1.119	1.108	1.101	1.099	1.103	1.119	1.1.85	1.085	1.026	100,0	100,0	106,9	98,64	93,3

Jika kita perhatikan tabel di atas, capaian indikator outcome pada tahun pertama dan tahun kedua (2009-2010) hampir seluruhnya mencapai 100% atau sesuai dengan target renstra, kecuali dua indikator yaitu angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RRLS), yang masing-masing 96,46%, 97,14% dan 103,86%, 104,59%.

Hal ini dikarenakan sumber penghitungan dua indikator tersebut dari instansi lain (BPS dan Bappeda). Adapun untuk indikator yang lainnya, realisasi yang sesuai target atau yang mencapai 100%, dikarenakan pada tahun III renstra periode 2008-2013 ada momentum perubahan dokumen renstra dan konsekuensinya ada penyesuaian target dengan realisasi. Sementara pada tahun-tahun selanjutnya, realisasi renstra terbagi dalam dua kategori, yaitu yang melebihi target dan yang tidak sesuai target, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di atas.

Selanjutnya untuk indikator pelayanan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar pada aspek indikator standar pelayanan minimal (SPM) yang berdasarkan pada peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang kemudian dirubah dengan Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 target-targetnya baru dimasukkan pada tahun 2012 dan 2013. Pada jenjang SD ada 8 (delapan) indikator, yaitu: (1) % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 64,03% dan 69,90%; (2) % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 52,24% dan 36,44%; (3) % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 85,08% dan 89,69%; (4) % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 98,32% dan 101,27%; (5) % SD yang memiliki 6 orang guru, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 102,81% dan 102,99%;

(6) % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 98,68% dan 100,85%; (7) % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 107,57% dan 115,69%; (8) % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 96,68% dan 122,31%.

Pada jenjang SMP, ada 8 (indikator) SPM, yaitu: (1) % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 80,65% dan 82,15%; (2) % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 109,10% dan 105,77%; (3) % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 104,40% dan 104,66%; (4) % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 94,77% dan 93,89%; (5) % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 95,88% dan 75,93%; (6) % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 $\geq 70\%$, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 72,56% dan 73,30%; (7) % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik $\geq 35\%$, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 33,24% dan 30,70%; (8) % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik, dengan capaian pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing adalah 69,67% dan 74,11%. Dari penjabaran capaian SPM di atas, dapat kita lihat bahwa dari 16 (enam belas) indikator banyak yang realisasinya tidak mencapai target, hal ini disebabkan antara lain: indikator tersebut relatif masih baru dan sebelumnya belum dilakukan telaahan; terlalu tingginya penetapan angka-angka dalam target indikator-indikator tersebut.

Untuk indikator yang realisasinya melebihi target, terdapat pada indikator yang berkaitan dengan guru, hal ini kemungkinan disebabkan adanya kebijakan pemerintah yaitu pemberian tunjangan sertifikasi terhadap guru yang secara langsung maupun tidak langsung guru berupaya untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Untuk indikator pelayanan pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada fokus kesejahteraan, terdapat delapan indikator sebagai alat ukurnya, yaitu: (1) Angka Melek Huruf (AMH); (2) Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS); (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PA; (4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB; (5) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PC; (6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; (7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; (8) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C. Dari 8 (delapan) indikator tersebut ada beberapa indikator yang realisasinya terus mengikat dari tahun 2009-2013, APM SMA/SMA/MA/PC misalnya, dari target 34,22%; 36,08%; 36,50%; 37,25%; 37,75% teralisasi 34,22%; 36,08%; 39,76%; 40,24%; 48,92%. Dengan demikian dalam kurun lima tahun, indikator tersebut ada peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sekitar 14,70%. Peningkatan ini kemungkinan besar disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang implementasi pendidikan menengah universal (PMU) atau wajib belajar 12 tahun, yang dibarengi dengan adanya pemberian bos untuk jenjang dikmen. Pada indikator yang kenaikannya belum mencapai target, terlihat pada APK SMP/MTs/PB contohnya, yang selama lima tahun terakhir kenaikannya hanya 2,14% atau rata-rata hanya 0,43% pertahunnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh faktor peningkatan jumlah penduduk usia 13-15 tahun lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tersebut yang masuk ke jenjang SMP/ sederajat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain:

1. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan di daerah.
2. Belum optimalnya hasil pelaksanaan pembangunan pendidikan karena masih terdapatnya tumpang tindih alokasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Propinsi .
3. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan pembangunan pendidikan dari instansi yang berkompeten.
4. Perubahan paradigma Pembangunan manusia seutuhnya adalah paradigma pendidikan yang menempatkan manusia sebagai subjek.
5. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pendidikan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan pendidikan selanjutnya.

Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

1. Adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan di daerah.
3. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan/pengiriman pendidik dan tenaga kependidikan untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar.
4. Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan .

5. Pengembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai *leading sector pendidikan* di daerah, memiliki tugas dan fungsi pelayanan pendidikan yang efisien, efektif, terarah, terpadu dan professional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan serta pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka pelaksanaan pendidikan harus :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan pendidikan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan bidang pendidikan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan.

- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga Pendidikan di daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan sekitar.

Beberapa isu strategis yang diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dituangkan dalam matrik analisa SWOT sebagai berikut:

Analisa Lingkungan	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Internal	- Legalitas berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 - Tersedianya SDM yang secara kuantitas mencukupi - Adanya kewenangan fungsi pendidikan daerah dan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi - Adanya dukungan sarana prasarana pendukung kerja	- Kwalitas dan Kwantitas Sarana dan Prasarana Belajar Belum Terpenuhi Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan - Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan valid untuk Proses P3D (Personel, Prasarana dan Penganggaran) Urusan Pendidikan Menengah - Belum Tersedia Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) - Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Belum Maksimal
Eksternal		
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Strategi S – O	Strategi W – O
- Adanya Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Anggaran Operasional Sekolah Tersedia Sekolah Tidak Memungut Iuran Kepada Orang Tua Siswa. - Adanya komitmen pemerintah Untuk Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas Sarana dan Prasarana Sekolah.	- Mendayagunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia. - Optimalisasi pendayagunaan institusi Dinas Dikbud - Optimalisasi Anggaran Untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) - Pendayagunaan Pendidik	- Penyediaan sarana prasarana pendidikan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. - Peningkatan ketersediaan data untuk proses P3D urusan pendidikan Menengah yang akurat dan akuntabel. - Penyediaan Anggaran untuk Operasioanl Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Peningkatan

4. Adanya Kemauan Pemuda untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan Daerah.	Dalam Pembangunan Pendidikan.	Mutu Pendidikan. 4. Penyediaan Anggaran Untuk Kegiatan Kebudayaan
Tantangan (<i>Treatment</i>)	Strategi S - T	Strategi W - T
1. Terbatasnya dukungan dana yang tersedia. 2. Masih kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang harus dipedomani 4. Rendahnya dukungan SDM bidang pendidikan . 5. Masih kurangnya pembinaan masyarakat dan pemasyarakatan kebudayaan.	1. Meningkatkan kualitas dan Kwantitas Sarana dan Prasarana 2. Menyediakan Dana Untuk Optimalisasi Pendidikan. 3. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 4. Meningkatkan pembinaan dan pengetahuan SDM pemuda.	1. Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan. 2. Memanfaatkan dukungan dana dalam peningkatan kualitas pendidikan yang baik 3. Meningkatkan Pemahaman Tentang Proses Peralihan P3D (Personel, Prasarana dan Penganggaran). 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemasyarakatan Kebudayaan .

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan di atas, dapat dirumuskan beberapa strategi dalam rangka optimalisasi institusi berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam analisis SWOT diupayakan menggunakan kekuatan (*strength*) untuk merebut peluang (*opportunity*) sehingga dapat dirumuskan strategi S-O, menggunakan kekuatan untuk memenangi tantangan (Strategi S-T), meminimalisir kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada (Strategi W-O), serta mengatasi kelemahan untuk menjawab tantangan (Strategi W-T).

Hasil analisis SWOT kemudian dilakukan pemberian skor dengan maksud untuk menentukan prioritas strategi yang akan ditindaklanjuti dengan pembangunan. Penentuan prioritas strategi berdasarkan pemberian skor sebagai berikut:

NO	STRATEGI	Bobot	Rating (%)	Skor
STRATEGI S - O				
1	Optimalisasi pendayagunaan institusi Dinas	3	6	18

	Pendidikan dan Kebudayaan			
2	Optimalisasi Anggaran Untuk Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA)	3	5	15
3	Pendayagunaan sarana dan prasarana Yang telah tersedia	4	5	20
4	Pendayagunaan Pendidik dalam Pembangunan Pendidikan	3	5	15
STRATEGI W - O				
1	Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	4	8	32(I)
2	Penyediaan Anggaran Untuk Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan	4	7	28(II)
3	Peningkatan Ketersediaan Data Untuk Proses P3D Urusan Pendidikan Menengah yang Akurat dan Akuntabel.	3	8	24 (IV)
4	Penyediaan Anggaran Untuk Kegiatan Kepemudaan	4	7	28 (III)
STRATEGI S - T				
1	Meningkatnya Kualitas dan Kwantitas Sarana dan Prasarana	3	6	18
2	Menyediakan Dana Untuk Optimalisasi Pendidikan	3	5	15
3.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	3	6	18
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengetahuan SDM Pendidik.	3	6	18
STRATEGI W - T				
1	Meningkatkan Kualitas dan Kwantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	4	5	20
2	Memanfaatkan dukungan dana dalam peningkatan kualitas pendidikan yang baik	3	6	18
3	Meningkatkan Pemahaman Tentang Proses Peralihan P3D (Personel, Prasarana dan	3	6	18

	Penganggaran) Urusan Pendidikan Menengah			
4	Meningkatkan peran serta pendidik dalam Pembangunan Pendidikan	3	8	24 (V)
JUMLAH			100	

Berdasarkan tabel pemberian skor di atas, maka dapat dirumuskan strategi berdasarkan urutan prioritasnya yaitu:

1. Menyediakan Sarana Prasana Pendidikan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
2. Penyediaan Anggaran Untuk Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan.
3. Peningkatan Ketersediaan Data Untuk Proses P3D (Personel, Prasarana dan Penganggggaran) Urusan Pendidikan Menengah.
4. Meningkatkan peran serta pendidik dalam Pembangunan Pendidikan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dimulai gaungnya sejak tahun 2015, telah mengantarkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih memimpin Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode tahun 2015-2021, dengan visi **"Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS"**. Dimensi yang terkandung dalam kalimat "EMAS" yaitu mewujudkan Bengkulu Selatan yang Elok, Aman. Maju dan Sejahtera.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan bernilai tambah.
5. Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan.
6. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
7. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.

Program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diantaranya yaitu :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
3. Penyediaan Infrastruktur dasar publik yang berkualitas dan prioritas.
4. Revitalisasi pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

5. Pembangunan kualitas Lingkungan hidup dan Mitigasi bencana.
6. Pengembangan UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata.
7. Pemberdayaan pemuda, perempuan dan keluarga sejahtera.
8. Peningkatan ketertiban umum dan keamanan.
9. Pembangunan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.

Mengacu pada visi dan misi serta program kepala daerah terpilih tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, antara lain:

Penghambat	Pendorong
1. Kualitas dan Kwantitas Sarana dan Prasarana Belajar Belum Terpenuhi Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan 2. Belum Tersedia Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 3. Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan valid untuk Proses P3D (Personel, Prasarana dan Penganggaran) Urusan Pendidikan Menengah 4. Partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan Belum Maksimal	1. Legalitas berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2016 2. Tersedianya SDM yang secara kuantitas mencukupi 3. Adanya kewenangan fungsi pendidikan dan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 4. Adanya dukungan sarana prasarana pendukung kerja

3.3 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Telaahan terhadap Renstra dimaksudkan untuk mengemukakan faktor-faktor penghambat atau factor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra OPD.

Penghambat	Pendorong
1. Kualitas dan Kwantitas Sarana dan Prasarana Belajar Belum Terpenuhi Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan 2. Belum Tersedia Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 3. Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan valid untuk Proses P3D (Personel, Prasarana dan Penganggaran) Urusan Pendidikan Menengah 4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Belum Maksimal	1. Legalitas berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2016 2. Tersedianya SDM yang secara kuantitas mencukupi 3. Adanya kewenangan fungsi pendidikan dan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 4. Adanya dukungan sarana prasarana pendukung kerja

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi :

1. Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan terhadap di atas, maka tujuan penataan ruang Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan sebagai berikut :

"Terwujudnya pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merata dan terpadu yang berbasis agropolitan, pariwisata serta mitigasi bencana yang berkelanjutan untuk 20 tahun ke depan"

Untuk mencapai tujuan diatas, maka kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

Kebijakan 1: Peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten dengan strategi sebagai berikut :

1. Membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten dan menuju ke kabupaten yang berbatasan.
2. Mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik.
3. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, dll) secara merata.

Kebijakan 2: Pemeliharaan dan Perwujudan Kelestarian Lingkungan Hidup serta mengurangi resiko bencana alam dengan strategi sebagai berikut :

1. Mempertahankan 40% luasan kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan.

3. Mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui perijinan, insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana.

Kebijakan 3: Pengoptimalan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi sebagai berikut:

1. Membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif
3. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.

Kebijakan 4: Peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan dengan strategi sebagai berikut:

1. Memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis
2. Diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder
3. Meningkatkan produktivitas sub sektor perikanan di sepanjang wilayah pantai dan perikanan darat (minapolitan) di Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kebijakan 5: Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan strategi sebagai berikut :

1. Mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi untuk iklim usaha
2. Menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi
3. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan.

Kebijakan 6: Pengoptimalan potensi-potensi pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan strategi sebagai berikut :

1. Mengelola objek-objek wisata yang telah ada agar bisa menjadi daya tarik masyarakat
2. Mengembangkan infrastruktur dan prasarana pariwisata sebagai penunjang objek wisata.
3. Mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian terhadap lingkungan hidup strategis dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini penting dilakukan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan mampu menjadi pemicu perilaku partisipatif dari stakeholder

pelaku pembangunan daerah.

Kajian lingkungan hidup strategis dapat menjadi dokumen yang menjamin pelaksanaan *sustainable development* di daerah, yang memuat beberapa informasi diantaranya :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup,
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dengan kajian lingkungan hidup strategis ini, maka diharapkan ke depannya perencanaan pembangunan dapat lebih berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan. Apabila pelaksanaan rencana pembangunan tidak sejalan dengan hasil KLHS maka kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan tersebut perlu diperbaiki dan ditinjau kembali.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis dinamika lingkungan eksternal terhadap proses Pelaksanaan pendidikan selama 5 (lima) tahun yang akan datang, yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian untuk menentukan tujuan di masa yang akan datang. Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang dilihat secara umum dan sistematis, dengan jalan melakukan identifikasi berbagai faktor-faktor dalam lingkungan internal dan eksternal .Beberapa isu strategis pendidikan yang

mempengaruhi proses pencapaian tujuan pembangunan pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode Rencana Strategi 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- a. Tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana belajar sehingga terpenuhi Standar Pelayanan Minimal di tiap sekolah.
- c. Peningkatkan disiplin aparatur pendidikan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan guru dan memberikan insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.
- e. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.
- f. Peningkatan Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan.

Dari beberapa Isu-Isu tersebut akan menjadi Prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan untuk periode tahun 2015-2020.

a. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Pemerataan pendidikan mengandung arti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan haknya memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal tersebut akan sangat sejalan dengan program yang tengah digulirkan pemerintah pusat yaitu *education for all* (Pendidikan Untuk Semua) yang menghendaki tidak ada seorangpun warga Negara yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Kondisi saat ini, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah lulusan SD/Setingkat SD dan SMP/Setingkat SMP dengan kapasitas daya tampung sekolah di atasnya (SMP/MTs dan

SMA/MA/SMK) sehingga mengakibatkan cukup banyak lulusan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Permasalahan lainnya dari pemerataan yaitu belum meratanya persebaran sekolah dengan sebaran penduduk di suatu wilayah. Hal ini menyebabkan di satu pihak ada sekolah yang kekurangan murid, sebaliknya ada pula sekolah yang justru tidak mampu menampung murid. Selain itu juga masih ada wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan yang tergolong daerah tertinggal.

b. Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing

Isu ini muncul dipicu oleh rendahnya kualitas lulusan. Mutu lulusan sangat berkorelasi dengan rata-rata nilai UAN dan penyerapan tenaga kerja pasca sekolah. Data menunjukkan, banyak siswa yang nilai UAN nya hanya tipis di atas standar nilai kelulusan dan tidak sedikit pula lulusan yang menganggur karena mereka tidak memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan dunia usaha/industri.

c. Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Pendidikan.

Isu ini muncul sehubungan masih rendahnya mutu lulusan yang salah satu penyebabnya adalah karena lemahnya manajemen atau tata kelola pendidikan. Aspek manajemen akan sangat menentukan terhadap kualitas perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan pendidikan. Termasuk di dalam aspek ini yaitu manajemen penyelenggaraan persekolahan dan manajemen birokrasi pendidikan yang belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu lulusan pendidikan. Permasalahan yang selalu berulang dari tahun ke tahun adalah ketidaktersediaan data pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel. Sistem pendataan pendidikan yang terpadu antara provinsi, kabupaten/kota sampai ke sekolah-sekolah belum berjalan sebagaimana yang

diinginkan. Lemahnya sistem pendataan pendidikan tersebut juga sangat mempengaruhi akuntabilitas dan pencitraan publik pelayanan pendidikan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Sebagai upaya menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum pembangunan, perlu disandingkan antara Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dengan memahami visi dan misi ini, diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan untuk bersama membangun daerahnya. Di sisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan).

A. Visi

Pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan akan dapat terlaksana dengan terarah dan sinergis apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunannya.

Berdasarkan hal di atas dan dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta upaya dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan di masa depan maka dirumuskan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu:

“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pendidikan yang merata dan Berkualitas berlandaskan Iman dan Taqwa “

Yang dimaksud dengan terwujudnya Pendidikan yang merata dan berkualitas adalah terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang dapat melayani semua insan pengguna pendidikan dengan tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai sehingga tercipta siswa yang cerdas secara komprehensif dan kompetitif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.

Tabel berikut ini memberikan deskripsi yang lengkap tentang yang dimaksud dengan insan cerdas komprehensif dan kompetitif.

Makna Insan Indonesia Cerdas Komprehensif		Makna Insan Indonesia Kompetitif	
Cerdas spiritual	Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.	Kompetitif	- Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan - Bersemangat juang tinggi - Mandiri - Pantang menyerah - Pembangun dan pembina jejaring - Bersahabat dengan perubahan - Inovatif dan menjadi agen perubahan - Produktif - Sadar mutu - Berorientasi global - Pembelajar sepanjang hayat
Cerdas emosional & sosial	- Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. - Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang: - membina dan memupuk hubungan timbal balik; - demokratis; - empatik dan simpatik;		

	– menjunjung tinggi hak asasi manusia; – ceria dan percaya diri; – menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; serta – berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.		
Cerdas intelektual	• Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; • Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif;		
Cerdas kinestetis	• Beraktualisasi diri melalui budaya untuk mewujudkan insan yang berkarakter, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas; • Aktualisasi insandiraga.		

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan demi tercapainya akselerasi pembangunan pendidikan yang berkelanjutan maka dirumuskan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan yang cerdas dan professional serta mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan formal maupun non formal.
3. Meningkatkan peran Kebudayaan dalam upaya membentuk karakter bangsa Indonesia.

Penjelasan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan yang cerdas dan profesional serta mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan menjadi salah satu keharusan yang tidak bisa dikesampingkan. Hal ini penting, karena peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat menjadi investasi yang potensial, dikarenakan secanggih apapun teknologi yang dipergunakan, dan sebagus apapun harapan yang diharapkan tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh SDM cerdas, berkualitas dan profesional. Sumber daya manusia yang berkualitas mampu menjadi motor penggerak pembangunan pendidikan demi tercapainya pembangunan pendidikan yang terarah, terpadu, komprehensif dan mendukung pembangunan pendidikan berkelanjutan merupakan tantangan sekaligus kekuatan yang mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan global. Peningkatan SDM Pendidik sangat dominan karena pendidik memiliki posisi sangat strategis dalam mempersiapkan generasi muda berkualitas, untuk peningkatan Sumber Daya manusia yang handal dan memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kecerdasan emosional yang tinggi.

Misi2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan formal maupun non formal.

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kebijakan prioritas yang akan dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, penyediaan sarana mencakup penambahan sarana untuk pendidikan dan rehabilitasi serta refitalisasi sarana prasarana yang rusak. Percepatan Pembangunan bidang pendidikan dalam rangka menghadapi era globalisasi sangat mendesak untuk dilakukan karena kualitas pendidikan secara umum tidak terlepas dari tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai baik pendidikan formal maupun non formal.

Misi 3 : Pendidikan membangun Kebudayaan

Pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut diatas mengandung aspek Kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Nilai Dasar.

Dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu ditetapkan nilai-nilai dasar sebagai acuan meningkatkan profesionalisme Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

- Integritas** : Dinas Dikbud Bengkulu Selatan membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan
- Independensi** : Dinas Dikbud Bengkulu Selatan menjunjung tinggi independensi baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu dalam semua hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Bebas dalam sikap mental dan penampilan dari kepentingan pribadi, ekstern, dan atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
- Profesionalisme** : Dinas Dikbud Bengkulu Selatan membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan serta berpedoman kepada aturan yang berlaku
- Respek** : Dinas Dikbud Bengkulu Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi selalu menaruh respek dengan siapapun berinteraksi.
- Amanah** : Dinas Dikbud Bengkulu Selatan menjunjung tinggi amanah yang dibebankan dengan tetap mengedepankan profesionalisme sebagai kewajiban yang harus diselesaikan dan dipertanggung jawabkan dengan jujur.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Belajar Sehingga Terpenuhi Standar Pelayanan Minimal Sekolah (SPM)	1. Meningkatnya Kondisi Bangunan Sekolah	4. Masih Banyak Sekolah yang Rusak Berat dan Rusak Ringan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		2. Mobiler berupa kursi dan meja murid yang tidak layak pakai 3. Penataan Lingkungan Sekolah yang belum tertata dengan baik	5. Mobiler berupa kursi dan meja murid yang tidak layak pakai 6. Penataan Lingkungan Sekolah yang belum tertata dengan baik	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket
2.	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah	1. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal.	1. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada semua tingkatan pendidikan.	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket
		2. Meningkatkan layanan terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan.	2. Terlaksananya upaya peningkatan mutu pendidikan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
3.	Tercapainya Proses Pengalihan P3D (Personel, Prasarana dan Penganggaran) urusan pendidikan menengah	1. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM pendidik.	1. Terlaksananya kegiatan pelestarian budaya.	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
			2. Terlaksananya kegiatan pemasyarakatan Kebudayaan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket

	Peningkatan Partisipasi kebudayaan dalam Pembangunan	2. Meningkatkan peran kebudayaan dalam membentuk karakter pelajar	3.					
--	--	---	----	--	--	--	--	--

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM di bidang pendidikan	- Penguatan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan - Meningkatkan kualitas pendidikan
2. Peningkatan ketersediaan data pendidikan yang sistematis, akurat dan akuntabel	- Penguatan data dan informasi pendidikan
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan akses teknologi informasi	- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. - Meningkatkan akses pembelajaran melalui teknologi informatika
4. Meningkatkan peran pembinaan, Monitoring dan Evaluasi untuk optimalisasi hasil pelaksanaan pendidikan.	- Peningkatan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan. - Peningkatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemasyarakatan kebudayaan	- Penguatan peran serta masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan. - Peningkatan pemasyarakatan kebudayaan

Dalam rangka pencapaian arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021 yang dirumuskan berdasarkan Visi, Misi tujuan strategis pembangunan pendidikan serta mengacu pada RPJMD kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021.

Maka strategi yang akan dicapai adalah:

1. Penyediaan dan pengembangan system Pembelajaran, data dan informasi dan standar mutu pendidikan dasar dan menengah serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan.
2. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana peningkatan mutu dan berkualitas yang merata di seluruh jenjang pendidikan sehingga terpenuhi Standar Pelayanan Minimal.
3. Pemerataan Guru dan perluasan akses pendidikan
4. Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan guru dan memberikan insentif pada guru yang bertugas di daerah pelosok/terpencil.

Adapun tahapan pencapaian sasaran strategis dan tujuan peningkatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

No.	Sasaran Strategis	Kondisi Pada Awal Periode Renstra (2010)	T A H U N				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	APK SD/SDLB/MI Paket A	97,36	97,60	97,90	98,20	99,40	100,20
2	APM SD/SDLB/MI Paket A	93,87	94,23	94,70	94,95	95,30	95,75
3	APK SMP/SMPLB/MTs Paket B	86,54	87,25	87,95	88,50	89,45	90,50
4	APM SMP/SMPLB/MTs Paket B	85,34	85,80	86,25	86,85	87,35	88,25
5	APK SMA/SMK/MA Paket C	82,96	83,50	84,25	85,95	86,35	87,10
6	APM SMA/SMK/MA Paket C	80,30	80,85	81,40	81,95	82,35	82,85

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 5 (lima) tahun telah menyusun beberapa program yang didasari oleh kebijakan yaitu : Perluasan dan Pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra public pendidikan. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan mengacu pada Sembilan langkah terobosan yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut :

1. Pendaaan seluruh bidang pendidikan
2. Peningkatan kualitas, kompetensi dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Penerapan TIK untuk e-Pembelajaran dan e-Administrasi.
4. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pendidikan.
5. Rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan.
6. Reformasi perbukuan secara mendasar.
7. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif
8. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra public pendidikan dengan pendekatan komprehensif.
9. Intensifikasi dan ektensifikasi pendidikan informal dan non formal untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada peserta didik yang terjangkau.

Berikut ini adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 yang akan datang sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- d. Penyediaan jasa surat menyurat.
- e. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- f. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- g. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- h. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- i. Penyediaan alat tulis kantor
- j. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- k. Penyediaan komponen listrik/penerangan kantor
- l. Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan
- m. Penyediaan Makanan dan Minuman
- n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- o. Penetapan angka kredit
- p. Penyediaan jasa administrasi pengelolaan barang aset daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- f. Rehabilitasi sedang/berat gedung UPTD Dinas Dikpora Bengkulu Selatan
- g. Pembangunan Pagar Dinas Dikpora Bengkulu Selatan
- h. Pengadaan Alat Komunikasi
- i. Pembangunan Gedung UPTD

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- d. Pendidikan dan Pelatihan formal
- e. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
- c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi semesteran
- d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- e. Penyusunan rencana kerja anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPD
- f. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
- g. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD
- h. Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerrintah (SPIP)

5. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- a. Pembangunan gedung sekolah
- b. Pengambangunan sarana dan prasarana bermain anak
- c. Pengadaan Meubeler sekolah
- d. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- e. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
- f. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaran bermain
- g. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
- h. Pengemban Pendidikan Anak Usia Dini
- i. Penyelenggaraan PAUD berstandar nasional
- j. Lomba kreatifitas guru dan murid TK
- k. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- l. Kegiatan Lomba Polisi Kecil

6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- a. Pengadaan Meubeler Sekolah
- b. Pengadaan Pelrnengkapan Sekolah
- c. Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
- d. Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
- e. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

- f. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dana BOS SD dan SMP
- g. Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI
- h. Ujian Akhir Sekolah (UAS)/Ujian Nasional (UN) SMP/MTs
- i. Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP
- j. Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMP/MTs
- k. Pelatihan Pengelola Dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah
- m. Pemberian Beasiswa Prestasi kepada siswa SD/MI/SMP/MTs dan Reward Nilai Tertinggi
- n. Pendataan Bantuan Siswa Miskin (BSM)
- o. Penyaluran Dana Bantuan Sekolah Daerah (BOSDA)

7. Program Pendidikan Non Formal

- a. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
- b. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal
- c. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
- e. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal
- f. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran non formal
- g. Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
- h. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal
- i. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan satuan pendidikan non formal
- k. Pembinaan dan pemasyarakatan PKBM
- l. Penyelenggaraan Ujian Paket A Setara SD
- m. Penyelenggaraan Ujian Paket B Setara SMP
- n. Penyelenggaraan Ujian Paket C Setara SMA
- o. Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keaksaraan dan kesetaraan
- p. Pemutakhiran data Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

- q. Pengawasan, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Non Formal

8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
- b. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. Workshop Guru Mata Pelajaran SMA, MA/SMK

9. Program Pendidikan Menengah

10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- a. Pelaksanaan Kerjasama Secara kelembagaan di bidang pendidikan (GNOTA)
- b. Pembinaan Dewan Pendidikan
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Melalui Beasiswa Berprestasi
- e. Pengawasan dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- f. Pengembangan ICT Jardiknas
- g. Pengiriman Anak Berprestasi
- h. Pendataan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- i. Penyusunan Profil Pendidikan
- j. Inventarisasi Barang
- k. Pengelolaan data Pokok Pendidikan

11. Program Pengembangan nilai budaya

- a. Pendataan dan pengembangan sumber daya tenaga kebudayaan

12. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- a. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- b. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

- c. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
- d. Renovasi perlengkapan pakaian adat

13. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- a. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
- b. Festival budaya daerah seni dendang

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	
1	Tersedianya Jasa surat menyurat	1 tahun	-	1	1	1	1	4
2	Tersedianya jasa telpon, air dan listrik	1 tahun	1	1	1	1	1	5
3	Terselenggaranya dan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	-	1	1	1	1	4
4	Tersedianya dan Terselenggaranya adm keuangan/tunjangan daerah	1 tahun	1	1	1	1	1	5
5	Tersedianya dan terpeliharanya kebersihan kantor	1 tahun	1	1	1	1	1	5
6	Tersedianya dan terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor	1 tahun	1	1	1	1	1	5
7	Terselenggaranya dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1	1	1	1	1	5
8	Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan listrik	1 tahun	1	1	1	1	1	5
9	Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan dan bahan bacaan	1 tahun	1	1	1	1	1	5
10	Tersedianya makan dan minum	1 tahun	1	1	1	1	1	5
11	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	1 tahun	1	1	1	1	1	5
12	Terlaksananya penetapan angka kredit	1 tahun	1	1	1	1	1	5
13	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 tahun	-	1	1	1	1	4
14	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	1	1	1	1	1	5
15	Terpeliharanya Kendaraan dinas	1 tahun	1	1	1	1	1	5
16	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	1	1	1	1	1	5
17	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 tahun	1	1	1	1	1	5
18	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 tahun	1	1	1	1	1	5
19	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 tahun	-	1	1	1	1	4
20	Terlaksananya BinteK peraturan perundang-undangan	1 tahun	-	1	1	1	1	4
21	Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	1 dokumen	1	1	1	1	1	5
22	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan semesteran	1 dokumen	1	1	1	1	1	5

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	
23	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi anggaran	1 dokumen	1	1	1	1	1	5
24	Tersedianya dokumen RKA/DPA	4 dokumen	4	4	4	4	4	20
25	Terencananya program dan kegiatan SKPD yang baik	1 dokumen	-	3	3	3	3	12
26	Tersedianya penerangan untuk proses belajar mengajar	PAUD	-	10	10	10	10	40
27	Tersedianya belanja cetak raport dan buku penunjang administrasi sekolah (TK)	Raport 1972 bh buku 346 buah	1972 dan 346	1972 dan 346	1972 dan 346	1972 dan 346	1972 dan 346	
28	Terlaksananya rehab bangunan sekolah	Unit	-	-	3	3	3	9
29	Berkembangnya PAUD	1 tahun	1	1	1	1	1	5
30	Terlaksananya lomba kreatifitas guru dan murid TK	1 Tahun	1	1	1	1	1	5
31.	Terlaksananya program PAUD percontohan	1 Tahun	-	1	1	1	1	4
32	Terwujudnya kesejahteraan bagi tenaga pendidik PAUD	1 Tahun	-	1	1	1	1	4
33	Terbangunnya sarana dan prasarana permainan edukatif anak usia dini	1 Kali	-	1	1	1	1	4
34	Terbangunnya perpustakaan khusus untuk anak usia dini	1 Buah	-	1	1	1	1	4
35	Terlaksananya proses pembelajaran yang berdasarkan 16 implementasi	1 dokumen	-	1	1	1	1	4
36	Terhimpunnya data anak usia dini yang akurat dan valid	1 dokumen	-	1	1	1	1	4
37	Terjalinnnya hubungan kerjasama antar sector nasional dan international	2 kali	-	1	1	1	1	4
38	Tersusunnya tujuan program pendidikan PAUD	1 Dokumen	-	1	1	1	1	4
39	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya pendidikan anak usia dini	6 kali	-	6	6	6	6	36
40	Tersedianya dana blockgrand widyakrama	1 tahun	1	-	-	-	-	1
41.	Tersedianya perpustakaan sekolah	Unit	18	20	15	15	10	78
42	Tersedianya perlengkapan SD	sekolah	125	125	125	125	125	625
43	Peningkatan infrastruktur sekolah	Unit						
44	Tersedianya dana BOS SD/SDLB dan SMP/MTs	1 tahun	1	1	1	1	1	5
45	Terlaksananya paket B setara SMP	1 tahun	1	1	1	1	1	5

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	
46	Terlaksananya Monev dan Pelaporan dana BOS	1 tahun	1	1	1	1	1	5
47	Percepatan Pengembangan SMP RSBI	1sekolah	1	1	1	1	1	5
48	Terlaksananya Olimpiade MIPA tingkat SD/MI	1 tahun	1	1	1	1	1	5
49	Terlaksananya UAS SD/MI	1 tahun	1	1	1	1	1	5
50	Terlaksananya UAS dan UN SMP/MTs	1 tahun	1	1	1	1	1	5
51	Tersedianya Raport & perangkat pelaporan	36 sekolah	36	36	36	36	36	180
52	Meningkatkan minat siswa terhadap SAINS	1 tahun	1	1	1	1	1	5
53	Tersedianya biaya operasional keg. DAK	Tahun	1	1	1	1	1	5
54	Percepatan pengembangan SD RSBI	1 sekolah	-	1	1	1	1	4
55	Terlaksananya Olimpiade Olahraga tingkat SMP/MTs	1 tahun	1	1	1	1	1	5
56	Pemberian beasiswa SD/MI, SMP/MTs	1 tahun	1	1	1	1	1	5
57	Tersedianya Perpustakaan, RKB dan rehab sedang/berat gedung sekolah	Unit	35	36	40	45	50	206
58	Tersedianya sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan (Tahap 1)	paket	40	45	50	55	60	250
59	Tersedianya sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan (Tahap 2)	paket	60	65	70	75	80	350
60	Tersedianya gedung sekolah baru	Paket	5	5	5	5	5	25
61	Tersedianya rumah dinas kepala sekolah guru, penjaga sekolah	Buah	5	5	5	5	5	25
62	Tersedianya saranaprasarana olahraga SD dan SMP	Buah	5	5	5	5	5	25
63	Tersedianya taman, lapangan upacara dan tempat paker	Buah	5	5	5	5	5	25
64	Tersedianya ruang UKS sekolah SD	Buah	5	5	5	5	5	25
65	Tersedianya ruang tempat ibadah SD	Buah	5	5	5	5	5	25
66	Tersedianya perpustakaan sekolah	Buah	5	5	5	5	5	25
67	Tersedianya jaringan listrik SD dan SMP	Buah	10	10	10	10	10	50
68	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	Buah	10	10	10	10	10	50
69	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	1 tahun	5	5	5	5	5	25
70	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	1 tahun	5	5	5	5	5	25
71	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah	1 tahun	5	5	5	5	5	25

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	
72	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeler sekolah	1 tahun	5	5	5	5	5	25
73	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	1 tahun	5	5	5	5	5	25
74	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1 tahun	5	5	5	5	5	25
75	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	1 tahun	5	5	5	5	5	25
76	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktek	1 tahun	5	5	5	5	5	25
77	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang UKS sekolah	1 tahun	5	5	5	5	5	25
78	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	1 tahun	5	5	5	5	5	25
79	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	1 tahun	5	5	5	5	5	25
80	Tersedianya tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi	1 tahun	1	1	1	1	1	5
81	Tersedianya tenaga penyusun kurikulum pada tiap satuan pendidikan	1 tahun	1	1	1	1	1	5
82	Tersedianya Ruang Kelas Baru untuk SMP/MTs /SMPLB	1 tahun	5	5	5	5	5	25
83	Tersedianya dana pengembangan sekolah SD dan SMP	1 tahun	5	5	5	5	5	25
84	Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	1 tahun	5	5	5	5	5	25
85	Tersedianya comprehensive teaching ang learning (CTL)	1 tahun	1	1	1	1	1	5
86	Terlaksananya sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	1 tahun	5	5	5	5	5	25
87	Terselenggaranya akreditasi sekolah dasar	1 tahun	1	1	1	1	1	5
88	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pendidikan Dasar	1 tahun	5	5	5	5	5	25
89	Tersedianya perengkapan sekolah	paket	5	5	5	5	5	25
90	Terpeliharanya bangunan sekolah	Ruang	0	11	11	-	-	22
91	Tersedianya personalia penyusunan kurikulum yang baik	1 tahun	1	1	1	1	1	5
92	Terselenggaranya Paket C setara SMA	1 tahun	1	1	1	1	1	5
93	Terselenggaranya Pra Olimpiade SAIN SLTA	1 tahun	1	1	1	1	1	5

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	
94	Terlaksananya Olimpiade Olahraga tk.SMA	1 tahun	1	1	1	1	1	5
95	Terselenggaranya UN/US SMA/SMK /MA	1 tahun	1	1	1	1	1	5
96	Pembinaan dan penanaman minat, bakat dan kreatifitas siswa tingkat menengah	1 tahun	1	1	1	1	1	5
97	Tersedianya gedung sekolah/RKB sekolah menengah	Ruang	-	3	3	4	4	14
98	Terberdayanya tenaga pendidikan non formal							
99	Terbinanya pendidikan kursus dan kelembagaan	1 tahun	-	1	1	1	1	4
100	Pemutakhiran data dan informasi pendidikan non formal	paket	-	1	1	1	1	4
101	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal	paket	-	1	1	1	1	4
102	Terlaksananya penyusunan program pendidikan non formal	paket	-	1	1	1	1	4
103	Terciptanya tenaga pendidik PNF yang berkualitas	paket	-	1	1	1	1	4
104	Terlaksananya pendidikan non formal yang diinginkan	paket	-	1	1	1	1	4
105	Tercapainya warga belajar yang terampil dan berwawasan pendidikan	paket	-	1	1	1	1	4
106	Meningkat pengetahuan warga belajar tentang keaksaraan	paket	-	1	1	1	1	4
107	Meningkatkan kecakapan hidup setiap warga belajar	paket	-	1	1	1	1	4
108	Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar PNF	paket	-	1	1	1	1	4
109	Agar masyarakat luas lebih memahami tentang PNF	paket	-	1	1	1	1	4
110	Agar terciptanya tujuan PNF	paket	-	1	1	1	1	4
111	Untuk meningkatkan pemahaman guru mengenai materi dan modal pembelajaran PNF	Tahun	-	1	1	1	1	4
112	Memberikan jaminan mutu kepada masyarakat tentang PNF	paket	-	1	1	1	1	4
113	Terwujudnya tujuna PNF yang diinginkan	paket	-	1	1	1	1	4
114	Agar masyarakat luas mengerti dan memahami tentang PNF	paket	-	1	1	1	1	4
115	Meningkatkan akuntabilitas satuan pendidikan	paket	-	1	1	1	1	4

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	
116	Agar masyarakat luas bias mendapatkan pendidikan setara SD dan SMP	2 kali	2	2	2	2	2	10
117	Agar masyarakat luas bias mendapatkan pendidikan setara SMA	2 kali	2	2	2	2	2	10
118	Meningkatkan Mutu PUS	Paket	-	1	1	1	1	4
119	Tersedianya bangunan gedung sekolah	Unit	-	1	1	1	1	4
120	Tersedianya bangunan ruang kelas sekolah	Ruang	-	1	1	1	1	4
121	Tersedianya Laboratorium dan ruang praktek	Ruang	-	1	1	1	1	4
122	Tersedianya sarana dan prasarana kebudayaan	Ruang	-	1	1	1	1	4
123	Tersedianya meubeler di sekolah	Buah	-	1	1	1	1	4
124	Tersedianya perlengkapan sekolah	Buah	-	1	1	1	1	4
125	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	paket	-	1	1	1	1	4
126	Banyaknya guru yang mengikuti sertifikasi	1 tahun	1	1	1	1	1	5
127	Banyaknya guru yang mengikuti Uji Kompetensi	1 tahun	1	1	1	1	1	5
128	Adanya dokumen pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	1 tahun	1	1	1	1	1	5
129	Terlaksananya workshop guru mata pelajaran SMA, SMK dan MA	1 tahun	1	1	1	1	1	5
130	Terlaksananya Penerapan KTSP pada program kesetaraan	Tahun	-	1	1	1	1	4
131	Terciptanya minat dan budaya baca	Tahun	-	1	1	1	1	4
132	Tersedianya bahan perpustakaan umum daerah	sekolah	-	10	10	10	10	40
133	Terlaksananya Monev dan Pelaporan oleh Pengawas sekolah	dokumen	-	1	1	1	1	4
134	Terlaksananya evaluasi hasil kinerja pendidikan	dokumen	-	1	1	1	1	4
135	Terlaksananya penerapan system dan informasi manajemen pendidikan	1 dokumen	1	1	1	1	1	5
136	Terlaksananya penerapan system dan informasi manajemen pendidikan melalui beasiswa prestasi	1 tahun	1	1	1	1	1	5
137	Terlaksananya pendataan pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA/SMK	1 tahun	1	1	1	1	1	5
138	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan tenaga pendidik	Tahun	-	1	1	1	1	5

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	
139	Tersedianya data pendidikan melalui Jaringan Pendidikan Nasional ICT	Tahun	-	1	1	1	1	4
140	Terdatanya sumber daya tenaga kebudayaan	Kecamatan	-	11	11	11	11	44
141	Terwujudnya pelestarian budaya daerah	kali	--	1	1	1	1	4
142	Terlaksananya pelestarian peninggalan sejarah purbakala	Kecamatan	-	11	11	11	11	44
143	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Kecamatan	-	11	11	11	11	44
144	Terlaksananya renovasi perlengkapan pakaian adat	1 tahun	-	1	1	1	1	4
145	Terciptanya Lingkungan UKS yang bersih	1 tahun	1	1	1	1	1	5
146	Terlaksananya festival budaya daerah	kali	-	2	2	2	2	8
147	Terlaksananya festival budaya daerah seni dendang	Tahun	-	1	1	1	1	4
148	Terciptanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Hardiknas	1 tahun	1	1	1	1	1	5
149	Terciptanya rasa solidaritas ikatan social di masyarakat	1 tahun	1	1	1	1	1	5

BAB VII

PENUTUP

7.1. Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016–2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021. Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pendidikan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder.

Renstra selain sebagai pedoman utama bagi pelaku pembangunan pendidikan dan Kebudayaan terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan beserta seluruh mitra pembangunan, juga merupakan acuan bagi pihak/instansi terkait dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan program terutama dalam hal penanganan permasalahan strategis bidang pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra sebagai dokumen perencanaan bukan merupakan dokumen kaku, tetapi suatu dokumen yang relatif fleksibel terhadap adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya kebijakan pembangunan, baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional.

Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan terutama

pada akhir periode Renstra, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama pada periode berikutnya.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan perencanaan pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan pendidikan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pelaksanaan pendidikan yang akan dihadapi setelah masa berlaku Renstra berakhir.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga keberadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga unsur otonomi daerah di bidang pendidikan yang profesional dapat terus ditingkatkan. Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 yang meliputi:

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya
2. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan 2016-2021 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan

kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan

NOVIANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19641130 198902 1 001

